

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PADA UNIT PERTOKOAN
DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI MINA UTAMA JAKARTA PUSAT**

**FRANSISCUS TRI WIBOWO
8105120469**



Laporan Praktek Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2015**

LEMBAR EKSEKUTIF

Fransiscus Tri Wibowo (8105120469), Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015.

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jalan Batu 4-5 Gambir, Jakarta Pusat yang berlangsung pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015.

Laporan ini menguraikan manfaat dan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta segala kegiatan praktikan selama PKL berlangsung. Dalam laporan ini juga diterangkan tugas yang dikerjakan praktikan diantaranya, membantu kelengkapan berkas kegiatan simpan pinjam pada setiap satuan unit kerja, mengelompokan dan menghitung total kegiatan simpan pinjam per satuan unit kerja pada periode tahun 2014 dan mengecek kegiatan simpan pinjam.

Praktikan mengalami beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi anggota dalam pengembalian kredit, kurang tegasnya koperasi dalam menangani masalah kredit macet, serta masiha belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan antara koperasi dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Koperasi Pegawai
Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Gambir, Jakarta Pusat

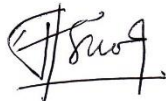
Nama Praktikan : Fransiscus Tri Wibowo

Nomor Registrasi : 8105120469

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Menyetujui,

Ketua Program Studi



Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si

NIP. 197201141998022001

Pembimbing,




Dra. Rd. Tutty Sariwulan, M.Si

NIP. 195807221986032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi,



Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si

NIP. 196610302000121001




LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si

NIP. 196610302000121001

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji,		
<u>Karuniana Dianta AS, S.IP.,ME</u>		<u>22-12-2015</u>
NIP. 198009242008121002		
Penguji Ahli,		
<u>Dicky Iranto, SE.,ME</u>		<u>27-11-2015</u>
NIP. 197106122001121001		
Dosen Pembimbing,		
<u>Dra. Rd. Tutty Sariwulan, M.Si</u>		<u>2-12-2015</u>
NIP. 195807221986032001		

iv | Laporan PKL

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan serta dapat menyelesaikan laporan tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti.

Laporan Kerja Praktek Lapangan ini disusun berdasarkan apa yang telah dilakukan pada saat dilapangan yakni pada tempat Praktek Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat dimulai dari tanggal 1 s/d 31 Januari 2015.

Praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selain untuk menuntas program studi yang penulis tempuh, kerja praktek lapangan ini ternyata banyak memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak dapat ditemukan saat berada di bangku kuliah. Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktek lapangan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Karuniana Dianta A.Sebayang, S.IP, M.SE selaku Ketua Konsentrasi Ekonomi Koperasi yang telah memberikan bimbingan dalam hal sebelum maupun sesudah menyelesaikan praktek kerja lapangan ini.

2. Ibu Dra. Tuty Sariwulan, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian laporan kerja praktek lapangan ini.
3. Bapak DR. Djumbuh Rukmono selaku Ketua Umum Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta bapak Agus Soelaeman selaku Manager Koperasi dan pegawai koperasi lainnya yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan kerja praktek lapangan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
4. Tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan kerja praktek lapangan ini.

Penulis akui tidak ada yang sempurna begitu pula dalam penulisan laporan ini, apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan laporan kerja praktek ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata semoga laporan kerja praktek lapangan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 1 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR EKSEKUTIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang PKL	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	3
C. Kegunaan PKL	4
D. Tempat PKL	5
E. Jadwal Waktu PKL	5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	
A. Sejarah Perusahaan	8
B. Struktur Organisasi KPN Mina Utama	13
C. Kegiatan Usaha Koperasi	20
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
A. Bidang Kerja	25
B. Pelaksanaan Kerja	25
C. Kendala Yang Dihadapi	28
D. Cara Mengatasi Kendala	32
BAB IV KESIMPULAN	

A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan

Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pada masa sekarang secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang menggairahkan. Namun, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan koperasi pada masa mendatang dikarenakan koperasi diharapkan menjadi salah satu yang memegang peranan dalam perekonomian khususnya di Indonesia. Menyadari pentingnya posisi koperasi dalam perekonomian Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh gerakan koperasi maupun Pemerintah, yang tujuannya mewujudkan koperasi yang tangguh dan mandiri serta mampu menjadi wadah kegiatan perekonomian rakyat. Namun, berbagai upaya itu tampaknya belum mampu mengangkat kinerja koperasi, terutama pada aspek kualitasnya, walaupun memang tidak dipungkiri terdapat beberapa koperasi yang patut dibanggakan. Meskipun koperasi mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan kondisi perekonomian nasional, tetapi peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak terlihat atau masih relatif kecil bila dilihat dari sudut pengentasan kemiskinan. Artinya, koperasi sendiri dalam perekonomian seharusnya mampu mengentaskan kemiskinan secara nasional, namun jangankan nasional untuk anggota dari koperasi tersebut saja

koperasi masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya ke tingkatan yang lebih layak.

Menghadapi fenomena di atas secara langsung dalam mempraktekkan ilmu ekonomi koperasi, sebagai mahasiswa yang belajar di konsentrasi ekonomi koperasi maka diwajibkan mengikuti kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) selama satu bulan di sebuah koperasi. Tujuan dari kegiatan PKL ini tidak hanya sekedar untuk mempratekkan ilmu ekonomi koperasi yang telah dipelajari di dalam perkuliahan tetapi juga untuk memperoleh data koperasi sehingga dapat digunakan sebagai hasil dari riset tentang perkembangan koperasi saat ini. Dalam perkembangannya koperasi memang terlihat sulit untuk berkembang secara pesat. Hal ini pun dapat dirasakan langsung di lapangan atau dunia kerja koperasi. Secara umum tujuan utama pendirian koperasi awalnya untuk kesejahteraan anggota, namun lambat laun dalam perkembangannya tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh koperasi, baik secara internal maupun eksternal.

Dewasa ini keberadaan koperasi sudah dianggap penting dalam beberapa instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD yang ada di Indonesia. Khusus di daerah Ibukota Jakarta masing – masing instasi pemerintah telah memiliki koperasi sendiri walaupun tidak semua instansi memilikinya. Koperasi yang sudah ada inipun belum mampu berkembang mengikuti perkembangan badan instansi pemerintah baik itu BUMN dan BUMD yang menaunginya. Sangat disayangkan, padahal jika koperasi dapat dikelola secara baik akan dapat membantu meningkatkan perekonomian orang – orang yang tergabung di dalamnya.

Penulis mendapatkan tempat praktek PKL di Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang beralamat di Jl. Merdeka Timur/ Jl. Batu 4 – 5 Jakarta Pusat. Selama melaksanakan PKL di Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak permasalahan yang ditemukan. Secara garis besar permasalahan tersebut belum mampu diselesaikan sepenuhnya. Namun dengan ilmu ekonomi koperasi yang sudah didapatkan di perkuliahan, tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Program PKL memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Maksud dan tujuan dari PKL ini adalah untuk:

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan pada mahasiswa.
2. Menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan laporan PKL.
3. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi – UNJ dengan Instansi Pemerintah atau Swasta dimana mahasiswa ditempatkan.

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi).
5. Memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa.
6. Mengetahui keadaan koperasi dan menyelesaikan masalah secara nyata.
7. Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan pada diri mahasiswa.
8. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.

C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan

1. Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN
 - a. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara instansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
 - b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
 - b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan.
 - c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal.

3. Bagi Fakultas Ekonomi – UNJ

Mendapatkan umpan balik (*feedback*) untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/ perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas Ekonomi – UNJ dapat mewujudkan konsep *link and match* dalam meningkatkan kualitas layanan pada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Mendapatkan data – data terbaru terkait koperasi yang berada di instansi pemerintah yang dapat diperoleh dari laporan praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa yang menjalankan PKL di instansi tersebut.

D. Tempat Praktek Kerja Lapangan

Praktikan melaksanakan PKL pada sebuah instansi pemerintah. Berikut ini merupakan data informasi perusahaan tempat pelaksanaan PKL:

Nama Instansi : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jl. Batu 4 – 5 Gambir Jakarta Pusat

Email : kpn.minautama@yahoo.co.id

Bagian Tempat PKL : Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama

E. Jadwal Waktu PKL

Jadwal waktu PKL dilaksanakan selama satu bulan dimulai dari tanggal 1 s/d 31 Januari 2015. Perincian tahap-tahap PKL sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Praktikan mencari informasi mengenai beberapa instansi pemerintahan dan BUMN yang akan dijadikan tempat PKL. Praktikan mencoba menghubungi instansi pemerintahan tersebut untuk meminta izin melaksanakan PKL di instansi pemerintahan dan BUMN yang akan dituju oleh praktikan, dan akhirnya praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKL di sebuah koperasi Kementerian Kelautan dan Perikanan . Untuk dapat melaksanakan PKL pada instansi pemerintah tersebut praktikan membutuhkan surat pengantar dari universitas, dimana praktikan meminta surat permohonan izin praktek kerja lapangan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan diteruskan ke bagian BAAK. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat pengantar dari universitas paling lambat selama empat hari kerja. Setelah empat hari kerja praktikan mengambil kembali surat di BAAK yang telah di tanda tangani pihak universitas, kemudian surat tersebut diantarkan ke instansi terkaityang ditujukan langsung kepada Manajer Koperasi tempat PKL.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 1 s/d 31 Januari 2015. Dengan ketentuan jam operasional:

Hari masuk : Senin s/d Jum'at

Jam kerja : 08.00 s/d 15.00 WIB

Waktu istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB

3. Tahap Pelaporan

Praktikan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada universitas mengenai kegiatan yang dilaksanakan di tempat melaksanakan PKL. Penulisan laporan PKL dimulai tanggal 20 September s/d 10 Oktober 2015. Penulisan dimulai dengan mencari data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan PKL, di mana data-data tersebut diolah dan diserahkan sebagai tugas akhir laporan PKL.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Perkembangan selanjutnya, terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

- a. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- e. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- f. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
- g. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
- j. Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

- a. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Inspektorat Jenderal;

- d. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- e. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- h. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
- j. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- k. Staf Ahli.

Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Kementrian Kelautan dan Perikanan sebagai sebuah lembaga organisa pemerintahan juga memiliki sebuah visi dan misi organisasinya. Visi dari KKP itu sendiri adalah “*kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat*”. Sedangkan misi dari KKP itu sendiri, yaitu:

- a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- c. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2. Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama

Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama didirikan untuk pertama kalinya dengan nama koperasi serba usaha Pegawai Departemen Perikanan Darat/ Laut disingkat KOSUP Perikanan tanggal 22 Februari 1965 di Jakarta. Dan disahkan menjadi Badan hukum pada tanggal 7 juni 1969.

Seiring dengan kedinamisan organisasi departemen, maka koperasi ini diubah namanya menjadi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Utama pada tahun 2002 disingkat KPN Mina Utama melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dibawah Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Dan pada tanggal 15 Desember 2006 melalui RALB anggota KPN diubah menjadi Koperasi Departemen Kelautan dan Perikanan “Mina Utama”.

B. Struktur Organisasi

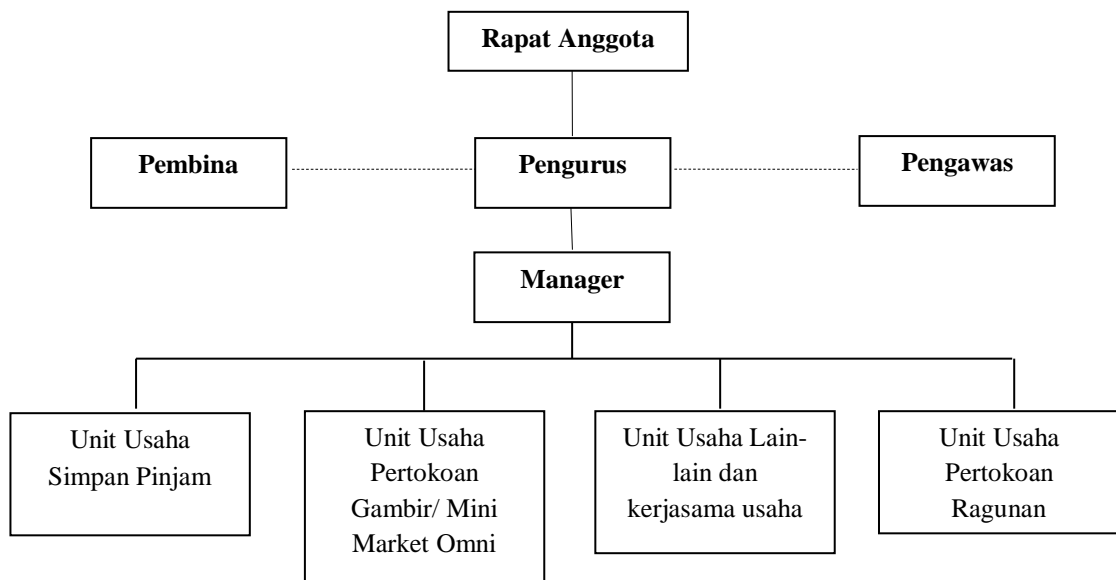
Sebuah organisasi atau lembaga diperlukan adanya suatu struktur kepengurusan organisasinya. Struktur organisasi diperlukan dalam sebuah organisasi karena didalamnya menyangkut sebuah kerangka kerja organisasi tersebut untuk menuju keprofesionalan kerja.

Robbins dan Coulter, menjelaskan bahwa struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan.¹ struktur organisasi secara tidak langsung menggambarkan pembagian tugas-tugas dalam membentuk alur rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh sebuah organisasi.

Koperasi Pegawai Mina Utama sebagai sebuah lembaga organisasi, tentunya memiliki struktur organisasi dalam kegiatan pengorganisasiannya. Adanya struktur organisasi didalam KPN Mina Utama memabantu para anggota organisasi ini untuk melakukan koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi.

¹ Robbins dan Coulter, *Manajemen Edisi Kedelapan*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), hlm.284

Struktur Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Koperasi

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. Di sini para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan himbuan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, ada pula yang mengadakan dua kali dalam satu tahun, yaitu untuk menyusun rencana kerja tahun yang akan datang dan membahas kebijakan pengurus selama satu tahun

yang lampau. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, rapat anggota mempunyai wewenang yang cukup besar sebagai berikut:

- a. Menetapkan anggaran dasar koperasi
- b. Menetapkan kebijakan umum koperasi
- c. Memilih serta mengangkat pengurus koperasi
- d. Memberhentikan pengurus
- e. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada dasarnya, tidak hanya pemegang jabatan yang diharuskan hadir namun semua anggota koperasi berhak hadir dalam rapat anggota. Kecuali, bagi mereka yang belum memenuhi syarat keanggotaan, misalnya belum melunasi simpanan pokok tidak dibenarkan hadir dalam rapat anggota. Ada kalanya mereka diperbolehkan hadir dan mungkin juga diberi kesempatan bicara, tetapi tidak diizinkan turut dalam pengambilan keputusan. Keputusan rapat anggota koperasi diperoleh berdasarkan azas musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak di mana masing – masing anggota koperasi memiliki satu suara. Selain rapat anggota biasa, juga dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa, yaitu apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus. Penyelenggara rapat anggota yang dianggap sah adalah jika koperasi yang menghadiri rapat telah melebihi jumlah minimal (kuorum). Kuorum rapat anggota

meliputi setengah anggota ditambah satu (lebih dari 50%). Jika tidak, maka keputusan yang diambil dianggap tidak sah dan tidak mengikat.

2. Pengawas

Tugas pengawas dapat dibagi menjadi dua yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dimaksudkan agar Pengurus dalam mengambil kebijakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, Pengawas harus berpedoman terhadap AD, ART, dan Peraturan Khusus koperasi. Sedangkan pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan administrasi pembukuan keuangan usaha koperasi yang dilakukan oleh pengurus yang dapat merugikan koperasi.

Tujuan pengawasan yang dilakukan adalah: meneliti kebenaran pembukuan dan administrasi koperasi, dan evaluasi kinerja Pengurus dalam satu tahun yang telah dilaksanakan. Fungsi pengawasan ini umumnya dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan sekali, pengawas melakukan audit untuk laporan keuangan koperasi yang mencakup setiap transaksi dari unit usaha koperasi baik simpan pinjam maupun toko koperasi dan sebagainya. Tidak hanya itu kinerja karyawan baik itu pengurus hingga pesuruh pun di tinjau dan dinilai oleh pengawas ini. Hasil dari penilaian pengawas ini dibuat menjadi laporan pengawasan yang akan dibahas dalam rapat anggota tahunan atau darurat atau dalam rapat pengurus

koperasi sebagai pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada tersebut.

3. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan anggota dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi.

4. Pembina

Pembinaan merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan operasional KPN Mina Utama pada tahun 2014, telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan koperasi primer PKP-RI DKI Jakarta dalam bentuk study banding di Malang dan pelatihan pengurus di Universitas Negeri Jakarta. Pembinaan ini dilakukan satu tahun sekali.

5. Manager Koperasi

Manager dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi. Keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi akan dapat berkembang lebih maju.

Kewajiban manager antara lain:

- a. Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
- b. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan – kegiatan di unit – unit usaha.
- c. Membimbing dan mengarahkan tugas – tugas karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
- d. Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.
- e. Menyusun Program Kerja untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Anggota.
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan dan tahun.
- g. Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi.

6. Unit Usaha Simpan Pinjam

Program unit usaha ini untuk mencatat transaksi pinjaman, angsuran, simpanan, dan accounting pada koperasi simpan pinjam. Koperasi dengan unit usaha simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Hal ini sama seperti menabung, anggota membayar setoran wajib setiap bulannya. Kemudian anggota

bisa meminjam dengan simpanan yang telah ia bayarkan secara rutin kepada koperasi.

7. Unit Usaha Pertokoan Gambir/ Mini Market OMI

Keuntungan yang diharapkan oleh koperasi bisa didapatkan dari usaha pertokoan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik anggota koperasi maupun masyarakat sekitar koperasi. Jika usaha pertokoan dapat dikembangkan akan membantu koperasi mendapatkan modal yang lebih besar. Unit pertokoan yang terletak di gambir berupa Mini Market OMI sekaligus menjadi satu dengan cabang utama koperasi pegawai negeri mina utama kementerian kelautan dan perikanan.

8. Unit Usaha Lain-lain dan kerjasama utama

Di koperasi ini, terdapat berbagai macam kegiatan usaha koperasi yang merupakan hasil kerjasama usaha sebagai bentuk pengembangan usaha koperasi. Sebagai contoh adalah kerjasama dengan PT OMI dalam bidang pertokoan retail sebagai pemasok barang – barang toko baik itu sembako, makanan ringan, minuman, rokok, dan sebagainya seperti yang terdapat pada toko swalayan pada umumnya.

9. Unit Usaha Pertokoan Rangunan.

Keuntungan yang diharapkan oleh koperasi bisa didapatkan dari usaha pertokoan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik anggota koperasi maupun masyarakat sekitar koperasi. Jika usaha pertokoan dapat dikembangkan akan

membantu koperasi mendapatkan modal yang lebih besar. Unit pertokoan yang terletak di Ragunan.

C. Kegiatan Usaha Koperasi

Dalam kegiatan perkoperasiannya, KPN Mina Utama menjalankan berbagai macam kegiatan usaha untuk memajukan kegiatan usaha koperasinya agar terus hidup dan berkembang. Kegiatan usaha yang dilakukan KPN Mina Utama tidak hanya kegiatan yang dikelola sendiri, tetapi ada juga bentuk kegiatan usaha yang berbentuk kerja sama dengan pihak ke tiga. Tujuannya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan para anggotanya. Macam-macam kegiatan usaha KPN Mina Utama yaitu:

1. Simpan pinjam anggota
2. Usaha pertokoan
3. Usaha sewa dan kerja sama
4. Usaha kredit sepeda motor dan barang lainnya.

Kegiatan usaha diatas relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, walaupun ada beberapa usaha yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan pada RAT tahun 2014. Pokok-pokok penjelasan setiap unit usaha adalah sebagai berikut:

1. Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam ini merupakan unit usaha yang bergerak dibidang pendanaan, baik untuk koperasi maupun untuk anggota kopersi. Pada unit ini, koperasi bertuga untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukan dana pinjaman. Dana ini dihimpun dari para anggota dan dana dari hasil kerja sama dengan pihak ke tiga.

Koperasi memberikan pinjaman, ke anggota yang meminjam akan dikenakan biaya bunga, yang mana biaya bunga pinjaman ini harus dibayar oleh anggota besarnya sesuai dengan bungan yang sudah ditetapkan dengan golongan pinjaman yang diberikan. Ada 5 golongan yang ditetapkan koperasi untuk memberikan pinjaman, yang mana besarnya bunga pinjaman masing-masing golongan berbeda-beda. Kelima golongan tersebut adalah:

a. Pinjaman Rumah tangga.

Pinjaman ini dilakukan anggota untuk kebutuhan dana sebagai keperluan rumah tangganya. Maksimum pinjaman pada golongan ini sebesar 5x gaji dengan jasa/bunga sebesar 1,5% per bulan dan diangsur selama 10 kali.

b. Pinjaman biaya pendidikan.

Pinjaman ini dilakukan anggota untuk keperluan pendidikan anggota keluarganya. Maksimum pinjama pada golongan ini sebesar 5 kali gaji dengan jasa 1 % per bulan dan diangsur selama 10 kali.

c. Pinjaman Kesehatan.

Pinjaman ini digunakan untuk keperluan kesehatan anggotanya. Besarnya pinjaman ini maksimal 5x gaji dengan jasa/bungan sebesar 0,5% tiap bulannya dan diangsur selama 10x

d. Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman yang digunakan anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha pribadi. Besar pinjaman ini mencapai 10x gaji dengan jasa/bungan sebesar 2,0% dan diangsur maksimal 20 kali.

e. Pinjaman Jangka Pendek.

Pinjaman ini sifatnya untuk keperluan mendadak. Besarnya pinjaman ini adalah sebesar Rp. 500.000 dengan jasa/bungan sebesar 2.0 % dan diangsur sebanyak satu kali.

2. Usaha pertokoan

Pada usaha pertokoan ini, KPN Mina Utama menjual berbagai macam kebutuhan para anggotanya, mulai dari menjual kebutuhan konsumsi hari hari, hingga menjual berbagai macam barang yang bermanfaat bagi anggotanya. Usaha pertokoan ini juga merupakan bentuk kerjasama usaha dengan PT. Inti Cakrawala Citra (OMI) yang memasok barang-barang kebutuhan yang akan dijual di toko-toko koperasi yang ada. Terdapat 4 pertokoan KPN Mina Utama yang terbagi di 4 tempat, yaitu:

- a. Pertokoan di jalan kebagusan
- b. Pertokoan di Ragunan
- c. Pertokoan Gambir KPN Mina Utama OMI
- d. Pertokoan KPN Menara 165.

Pertokoan ini dikelola secara baik oleh koperasi karena termasuk usaha yang sangat produktif bagi pendapatan koperasi selain usaha simpan pinjam.

3. Usaha Lain-lain

Terdapat berbagai macam kegiatan usaha di koperasi yang merupakan hasil kerjasama usaha sebagai bentuk pengembangan usaha koperasi. Usaha-usaha tersebut adalah:

- a. Sewa kantin, usaha lahan kantin yang terdapat di gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Usaha Ikan Olahan/ Beku, yaitu usaha koperasi sebagai bentuk layanannya kepada anggota dalam pemenuhan kebutuhan ikan untuk konsumsi. Pembelian produk ini dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.
- c. Usaha kredit kendaraan dan barang elektronik, yaitu usaha penjualan barang-barang elektronik dan kendaraan roda dua yang bekerja sama dengan PT. Bangun Kreasi Cemerlang untuk pengadaan barang elektronik, kerjasama dengan PT. Astra Internasional Tbk dalam pengadaan penjualan sepeda motor

merk HONDA, dan kerjasama dengan PT. Putra Persada Nusantara untuk pengadaan penjualan sepeda motor YAMAHA.

- d. Usaha Photocopy, yaitu usaha yang dilaksanakan dengan pihak ketiga dengan system bagi hasil.
- e. Usaha Kerja sama Keramba Jaring Apung, yaitu usaha kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan keramba jarring apung di Waduk Cirata, Jawa Barat dan Muara Baru Jakarta.
- f. Usaha Kegiatan Resepsi Pernikahan Gedung Mina Bahari III, yaitu usaha koperasi dalam mengelola ballroom yg terdapat di gedung Mina Bahari III yang disewakan sebagai tempat resepsi pernikahan yang dapat disewa pada hari sabtu dan minggu.
- g. Penyaluran BBM di PPS Bungus Padang, yaitu kerja sama koperasi dalam pengadaan BBM solar untuk para nelayan di Pelabuhan Perikanan Bungus Padang.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Kegiatan praktik kerja lapangan di Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama, praktikan ditempatkan pada unit simpan pinjam. Tujuannya adalah untuk membantu persiapan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang akan diselenggarakan bulan Mei. Oleh karena itu, koperasi memerlukan bantuan tenaga pada bagian unit simpan pinjam.

Selama ditempatkan pada unit simpan pinjam ini selama 1 bulan, praktikan telah mengerjakan berbagai macam kegiatan, yaitu:

1. Mencocokkan hasil kegiatan simpan pinjam dengan data yang sudah ada.
2. Menginput hasil total kegiatan simpan pinjam masing-masing unit kerja ke komputer.
3. Mem-backup Ibu. Roby sebagai penerima anggota dalam bentuk kegiatan simpan dan pinjam ketika beliau sedang ada keperluan lain.
4. Membantu kegiatan koperasi lainnya, seperti mencari travel untuk kegiatan sosial koperasi, menjaga toko koperasi di ragunan, serta belajar melakukan tutup kasir.

B. Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 5 Januari 2015 sampai 31 Januari 2015. Kegiatan PKL ini dilakukan sesuai dengan hari kerja yang berlaku di koperasi tersebut dengan jadwal masuk setiap jam 08.00-15.00 wib. Waktu kerja tersebut berlaku untuk setiap harinya mulai dari hari senin sampai jum'at, kecuali untuk toko koperasi yang berada di daerah kebagusan yang mana buka disetiap harinya.

Pada awal praktikan masuk kerja, praktikan hanya diberikan arahan oleh bapak Agoes selaku manager mengenai gambaran-gambaran umum tentang Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama. Beliau menjelaskan unit-unit kerja di koperasi tersebut serta menjelaskan berbagai macam bentuk kerja sama koperasi dengan pihak luar sebagai upaya untuk melakukan pengembangan koperasi. beliau juga memperkenalkan struktur koperasi Mina Utama dan para staf-stafnya. Setelah beliau menjelaskan secara panjang lebar mengenai hal-hal tersebut, praktikan langsung diserahkan kepada Ibu. Roby untuk diberikan tugas yang dapat dikerjakan.

Ibu Roby sendiri bertugas di bagian unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana setiap harinya melayani permintaan anggota untuk melakukan kegiatan simpan dan pinjam. Pada unit inilah praktikan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan:

1. Mencocokkan hasil kegiatan simpan pinjam dengan data yang sudah ada.

Setelah melakukan perhitungan total kegiatan tadi, maka hasil perhitungan tersebut dicocokkan dengan hasil perhitungan oleh data awal. Jika ada yang berbeda, praktikan harus menganalisis dan menjelaskan mengapa terjadi

perbedaan. Biasanya perbedaan terjadi akibat adanya anggota koperasi yang mengundurkan diri, mutasi dan pensiun.

2. Menginput hasil total kegiatan simpan pinjam masing-masing unit kerja ke komputer. Setelah semua data setiap unit satuan kerja selesai, maka perhitungan diinput kedalam computer untuk dicetak hasilnya dan dilaporkan ketua bidang simpan pinjam kepada bidang keuangan dan manager.

3. Mem-backup Ibu. Roby sebagai penerima anggota dalam bentuk kegiatan simpan dan pinjam ketika beliau sedang ada keperluan lain. Kegiatan ini terjadi apabila Ibu Roby memiliki keperluan dan tidak ada dikantor. Kondisi kekosongan ini praktikan ambil alih untuk melayani setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman ataupun membayar tagihan pinjaman. Praktikan menuliskan nama anggota yang akan melakukan pinjaman pada buku daftarajuan pinjaman, menuliskan asal unit satuan kerja anggota, dan terakhir menuliskan nominal pinjaman beserta alasannya dan meminta tanda tangan anggota. Setelah semua itu dilakukan, praktikan hanya memberikan buku tersebut kepada Ibu. Roby untuk ditindak lanjutin prosesnya.

4. Stok opname (bagian gudang barang) toko koperasi di kebagusan. Kegiatan pkl selain di koperasi yang berada di gambir, tetapi juga dilakukan di toko koperasi yang berada di jl. Kebagusan. Praktikan melakukan kegiatan ini di hari sabtu dan minggu saat sebagian karyawan libur, sehingga praktikan bisa mengisi kekosongan itu untuk membantu kegiatan koperasi di toko tersebut. Praktikan

bertugas menjadi stok opname (bagian gudang barang) yang dimulai dari pukul 10.00 wib hingga pukul 14.00 wib. Tugasnya adalah menghitung stok barang yang ada di display toko dengan yang ada di gudang barang, kemudian bila terjadi kekosongan di toko maka diambil dari gudang untuk memenuhi barang yang kosong.

C. Kendala yang dihadapi.

Praktek kerja lapangan membuat para mahasiswa merasakan suasana dunia kerja yang sebenarnya. Selama mengikuti kegiatan PKL ini praktikan menemukan beberapa masalah yang mungkin menjadi pertanyaan yang sangat membingungkan bagi praktikan. Baik itu masalah dari dalam diri praktikan itu sendiri, maupun dari apa yang dilihat, dirasakan dan dialami praktikan didalam tempat kerjanya.

Terdapat beberapa masalah yang dialami oleh praktikan saat berlangsungnya proses praktek kerja lapangan ini, masalah ini terdapat dalam diri praktikan sendiri mungkin dikarenakan ini merupakan hal baru bagi praktikan yaitu melakukan pekerjaan di koperasi serta kurangnya pengalaman praktikan dalam berkerja. Masalah – masalah tersebut adalah:

1. Mencocokkan hasil kegiatan simpan pinjam dengan data yang ada.

Pada bagian ini praktikan bertugas mencocokkan data pinjaman anggota koperasi per divisi bagian kementerian kelautan dan perikanan dengan data yang ada (struk transaksi). Hasil keuntungan dari bunga pinjaman yang terima koperasi dibandingkan dengan struk transaksi real per anggota koperasi dari setiap divisi yang ada. Praktikan mengalami kesulitan yang lumayan besar

dikarenakan terdapat banyaknya anggota koperasi dalam tiap divisi, serta divisi yang lumayan banyak kurang lebih terdapat 15 divisi. Dari segi jumlah anggota hanya itu, tetapi dari sisi data terdapatnya perbedaan antara keuntungan dari hasil simpan pinjam yang seharusnya diterima oleh koperasi berbeda dengan apa yang dibayarkan anggota. Sehingga terjadi perbedaan antara total keuntungan yang harus diterima dengan struk pembayaran anggota secara total terdapat perbedaan pada bagian tersebut.

Masalah tersulit adalah praktikan dituntut teliti untuk menghitung kekurangan pembayaran tiap anggota pada setiap divisi kemudian per divisi baru total keuntungan yang di bandingkan dengan struk yang ada. Tingkat kesulitan yang lumayan tinggi untuk praktikan yang baru pertama bekerja sebagai pengalaman yang luar biasa menurut praktikan.

2. Melakukan input data hasil penghitungan ke komputer

Praktikan menginput data hasil perhitungan tadi kedalam komputer, jadi total kegiatan simpan pinjam anggota koperasi di input ke dalam aplikasi excel di komputer koperasi dibagi kedalam setiap divisi menurut NIP anggota koperasi per divisinya. Ini sebagai perhitungan jasa anggota koperasi untuk pembagian SHU kelak di akhir periode.

Kesulitan praktikan dikarenakan tidak terurutnya data anggota koperasi pada database komputer sehingga praktikan harus membuat dari awal sesuai dengan urutan NIP per divisi kementerian kelautan dan perikanan, hal ini

cukup membutuhkan konsentrasi lebih dalam peninapan database ini. kesalahan input akan berakibat pada kerugian koperasi.

3. Melakukan back-up pekerjaan ibu Roby

Praktikan terkadang melakukan back-up pekerjaan yang dilakukan oleh ibu Roby, beliau merupakan pegawai koperasi yang bertugas untuk melayani anggota koperasi yang hendak melakukan pinjaman ke koperasi. Ibu Roby terkadang harus melakukan transaksi ke bank sehingga terkadang harus meninggalkan koperasi untuk pergi ke bank. Disaat ini lah praktikan melakukan back-up apabila ada anggota yang ingin melakukan pinjaman.

Praktikan mengalami kesulitan yang lumayan berarti karena form peminjaman yang cukup rumit karena munculnya pertanyaan dari anggota koperasi perihal pengisian form peminjaman tersebut, sehingga praktikan mencari pegawai lain untuk bertanya mengenai form tersebut. Terlebih lagi bila ada anggota koperasi yang bertanya kapan dapat dicairkan pinjamannya, praktikan harus membuka AD/ ART koperasi untuk melihat peraturan yang menyangkut masalah pencairan pinjaman perihal waktu pencairan, jumlah maksimal peminjaman, biaya bunga, angsuran, dan sebagainya.

4. Melakukan stok opname toko koperasi

Praktikan terkadang diminta bantuan oleh kepala toko koperasi untuk membantu beliau untuk melakukan pengecekan stok barang pada toko koperasi. Pengecekan dilakukan dengan mencatat barang yang telah habis pada toko koperasi kemudian melihat apakah masih terdapat stok barang itu lagi di

gudang koperasi atau tidak. Bila sudah tidak ada maka praktikan melaporkan hal tersebut ke kepala toko koperasi.

Kesulitan yang dialami praktikan adalah saat pengisian barang dari gudang ke toko apabila toko dalam keadaan penuh pembeli, kesulitan bergerak karena terbatasnya ruangan toko menjadi kendala yang cukup merepotkan dalam pengisian stok barang. Kemudian terjadi kesulitan apabila stok barang gudang kosong praktikan dimintai tolong untuk melakukan pemesanan ke supplier, praktikan agak kesulitan dalam pemesanan barang ke supplier dan biasanya dipandu oleh kepala toko secara perlahan.

Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPN-Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan) sejatinya merupakan koperasi yang besar dan memiliki banyak keunggulan untuk menjadi sebuah koperasi yang makmur. Namun, selama melakukan praktik disana, praktikan melihat ada beberapa masalah yang dihadapi koperasi yang mungkin menurut praktikan akan mengancam keberlangsungan usaha KPN Mina Utama itu sendiri. Masalah – masalah tersebut adalah:

1. Kurangnya pengawasan koperasi dalam pemberian kredit selektif kepada anggota.

Dalam kegiatan simpan pinjam di koperasi antusiasme anggota dalam kegiatan ini sangat tinggi karena setiap anggota memiliki keperluan pribadi baik dalam kesehatan, pendidikan, rumah tangga, usaha bisnis, dan jangka pendek. Koperasi menyediakan pinjaman dalam lima kategori tersebut, karena itu

animo anggota sangatlah besar. Seakan berlomba-lomba anggota koperasi melakukan pinjaman kepada koperasi, namun tanpa pertimbangan pemberian kredit selektif inilah yang menjadi masalah untuk koperasi sendiri. Karena pemberian pinjaman kurang didasari dengan pertimbangan matang baik kemampuan pengembalian anggota yang meminjam ataupun keperluan peminjamannya. Sehingga menimbulkan kredit macet atau failed credit.

2. Kurang tegas koperasi dalam pembatasan kredit kepada anggota, dikarenakan rasa kekeluargaan koperasi yang begitu kuat.

Di dalam pertimbangan pemberian kredit kepada anggota koperasi memiliki kriteria tertentu dalam pemberian pinjaman ke anggota. Namun apabila anggota belum memenuhi kriteria yang ditentukan atau ditetapkan oleh koperasi seharusnya pinjaman tidak bisa di proses atau di cairkan. Tetapi keadaan ini berbeda di koperasi tempat praktikan bekerja, dikarenakan rasa kekeluargaan yang begitu erat seperti yang dilansir oleh manajer koperasi, maka dengan mempertimbangkan hal tersebut pinjaman dapat di cairkan sesuai dengan pertimbangan manajer koperasi. Terkadang kebaikan koperasi ini menjadi awal mula masalah kredit macet karena bisa jadi anggota yang meminjam sudah terlalu banyak terikat masalah pinjaman di berbagai instansi yang ada.

D. Cara Mengatasi Kendala

Setelah praktikan menjelaskan beberapa masalah yang mungkin dapat menjadi masalah serius bagi koperasi, maka praktikan dengan kemampuan pengetahuan yang ia miliki selama menempuh kegiatan perkuliahan di kampus, maka ada beberapa masukan dan saran untuk koperasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, yaitu:

1. Masalah pengawasan kredit selektif.

Pengawasan merupakan salah satu hal terpenting dalam kemajuan sebuah koperasi. pengawasan dapat mengontrol pertumbuhan dan kemajuan koperasi dalam mensejahterakan para anggotanya. Layaknya kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya berupa pengawasan kepada kegiatan perbankan, yaitu pengawasan pinjaman secara selektif (kredit selektif) yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank².

Seperti halnya pengawasan dalam perekonomian negara dalam koperasi pun harus memiliki pengawas yang merupakan perangkat organisasi yang diberi mandat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap terhadap kegiatan koperasi. Tugas pokoknya yaitu: (1) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. (2) membuat laporan tertulis tentang hasil dari pengawasan yang telah dilakukan.³ Begitu pula dalam menangani masalah kredit selektif ini pengawas pun berhak mengawasi koperasi dalam pemberian kredit kepada anggotanya apabila pemberian kredit di luar dari ketentuan

² Sudremi, yuliana, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

³ Nasution Muslimin, *Koperasi Menjawab Konsep Ekonomi Sosial*, (PT: sabarini-jakarta,2008)

syarat-syarat yang telah ada maka berhak ditindak lanjuti. Untuk itu fungsi pengawasan ini harus lebih ditingkatkan kembali. Apabila terjadi kelumpuhan dalam fungsi ini maka akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan baik oleh pengurus maupun anggota koperasi.

2. Kurang tegas koperasi dalam pembatasan kredit kepada anggota, dikarenakan rasa kekeluargaan koperasi yang bergitu kuat.

Walaupun maksud dari koperasi ini untuk membantu mensejahterahkan anggota koperasi karena didasari oleh rasa kekeluargaan yang ada didalam koperasi melalui pencairan pinjaman anggota tetapi koperasi pun harus memperhatikan tingkat kemungkinan kredit macet atau credit failed dari anggotan yang hendak meminjam namun tidak memenuhi syarat apabila dimungkinkan diberikan pengecualian maka dapat dilakukan namun tetap yang terpenting dan terutama adalah kemampuan tingkat pengembalian anggota. Karena koperasi ada untuk mensejahterakan seluruh anggotanya jangan hanya karena beberapa orang yang tidak kompeten ini membuat semua anggota terkena imbasnya.

Karenanya untuk mengurangi resiko ini ataupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini perlu adanya manajemen koperasi yang profesional atau profesionalisme koperasi. Apabila koperasi berkemauan tumbuh dan berkembang dengan tuntutan pelayanan yang optimal kepada anggota maka koperasi sudah saatnya beralih dari manajemen konvensional ke manajemen profesional. Pada dasarnya esensi yang menjadi sasaran utama manajemen koperasi harus menyentuh dua sisi kehidupan koperasi yakni sisi

keorganisasian/ kelembagaan dan sisi usaha koperasi itu sendiri. Kedua sisi ini saling berkaitan erat, dapat berjalan seiring dengan kesadaran dan peran serta para anggota sesuai dengan proporsinya.⁴

Jadi baik itu koperasi ataupun anggota dalam hal peminjaman kredit ini harus mengerti proporsinya masing-masing. Koperasi harus mengerti kebutuhan anggota tapi tidak juga lupa dengan aturan yang ada karena aturan yang ada dibuat untuk kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Sedangkan anggota yang hendak melakukan pinjaman ini pula harus mengerti kemampuan pribadinya dengan tingkatan kapasitas pengembalian kredit yang dia miliki sehingga tidak terjadi bentrokan antara kapasitas pribadi dengan keinginan pribadi. Serta pengutamaan peminjaman didasarkan pada skala prioritas yang ada bukan untuk konsumsi semata. Skala prioritas adalah suatu daftar bermacam macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya.⁵

⁴ Bambang, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1997)

⁵ Adji, Wahyu, *Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa selama melaksanakan praktek kerja lapangan di Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan koperasi masih mengalami berbagai hambatan baik secara internal maupun eksternal. Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut perlu dicarikan solusi yang tepat agar koperasi tetap bisa berjalan dan memberikan manfaat terutama bagi anggotanya. Ketidakaktifan dari anggota koperasi menjadi kendala bagi keberlangsungan koperasi karena seharusnya nasib dari koperasi bukan hanya ditangan pengurus saja melainkan ditangan seluruh anggota koperasi karena koperasi ini adalah milik bersama.
2. Koperasi memerlukan manajemen profesional yang berkualitas untuk dapat menjalankan koperasi sesuai dengan aturan yang ada sebenarnya baik dalam UU yang mengatur tentang Koperasi dan sebagainya yang dapat membantu perkembangan koperasi ke arah yang lebih maju.

3. Perlunya peningkatan dalam kepengurusan koperasi khususnya dalam pengawasan koperasi. Fungsi pengawasan ini perlu ditingkatkan agar dalam menjalankan aktivitasnya koperasi diawasi dengan baik dan benar oleh pengawas. Khususnya dalam hal pelaksanaan usaha koperasi yaitu unit simpan pinjam agar tidak adanya kesalahan khususnya dalam kegiatan simpan pinjam di koperasi.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan

Fungsi pengawasan ditingkatkan sehingga proses usaha koperasi baik di sektor simpan pinjam ataupun pertokoan dapat dimonitoring dengan baik sehingga perputaran modal lebih jelas terlihat dan tingkat keberhasilan serta keuntungan lebih besar. Kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan kembali bidang-bidang usaha yang sekiranya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Solusi masalah perkoperasian ini tidak hanya dapat diperoleh dari para pengurus ataupun pengawas tetapi solusi bagi koperasi dapat diperoleh dari anggotanya, karenanya diharapkan keaktifan seluruh anggota demi keberlangsungan koperasi bersama.

2. Bagi Fakultas Ekonomi – UNJ

Pada Pratek Kerja Lapangan pihak Fakultas sudah membuat aturan untuk mencari tempat PKL di Kementerian ataupun BUMN. Kedepannya diharapkan dengan adanya kerjasama yang sudah terjalin di beberapa instansi

pemerintah ini dapat memudahkan dalam memberikan masukan dan bekerjasama untuk berkontribusi meningkatkan peran koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Robbins dan Coulter. 2007. Manajemen Edisi Kedelapan. Jakarta: PT Indeks.

Sudremi, yuliana. 2007. Pengetahuan Sosial Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution Muslimin. 2008. Koperasi Menjawab Konsep Ekonomi Sosial. PT: sabarin-jakarta.

Bambang. 1997. Manajemen Koperasi, Penerbit BPFE-UGM, Yoyakarta

Adji, Wahyu. 2007. Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Erlangga

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Sebagai soko guru perekonomian, koperasi memungkinkan untuk berkembang secara ekonomis, mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepada anggotanya serta masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi dengan berbagai kebijaksanaan dan kemudahan dibidang usaha, permodalan, perkreditan, dan bidang yang lain yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Sampai saat ini koperasi lebih tertinggal dibanding dengan lembaga perekonomian lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Walaupun kini di setiap instansi pemerintah maupun BUMN dan BUMD telah memiliki koperasi. Namun perkembangan koperasi masih kalah dengan

lembaga perekonomian tersebut. Penyebab ketertinggalan ini, karena banyaknya persoalan yang harus dihadapi oleh koperasi dalam pengelolaannya.

Berbagai persoalan tersebut secara internal dapat meliputi delapan indikator pengukur keberhasilan koperasi. Apakah koperasi dengan keterbatasan yang ada mampu berjalan dan bertahan di tengah perekonomian Indonesia. Delapan indikator tersebut meliputi: kontrol administrasi, kepengurusan, insentif, kekuasaan, modal sosial, partnership, kepemilikan, dan kontrak hukum. Masing-masing indikator memiliki peran penting akan fungsinya di dalam koperasi. Kedelapan indikator ini seharusnya dipenuhi oleh koperasi demi mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan suatu koperasi yang didirikan dalam rangka membantu kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja di Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP). Keberadaan koperasi ini sangat dirasakan dampaknya oleh para pegawai untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari.

Sebagai sebuah lembaga perkoperasian, tentunya KPN Mina Utama memiliki sistem tata kelola yang harus diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Sistem tata kelola yang baik mampu membantu koperasi dalam mencapai kesuksesan usahanya yang tentunya akan dirasakan bersama-sama oleh para anggotanya. Ada 8 indikator yang harus diperhatikan dalam tata kelola koperasi, yaitu meliputi kepemilikan, kekuasaan, insentif, partner selection, kepengurusan, kontrol administrasi, pengawasan hukum, dan modal sosial. Dari kedelapan aspek tersebut koperasi dapat dikatakan sebagai koperasi yang baik.

Kedelapan tata kelola tersebut harus dijalankan dengan baik oleh KPN Mina

Utama. Namun, salah satu yang menjadi hambatan dari koperasi adalah kontrol administrasi di dalam koperasi. Salah satu contohnya adalah pada pengelolaan koperasi di dalam sistem administrasinya yang hanya bertumpu pada satu orang karyawan yaitu Ibu Robi selaku staf administrasi. Tentunya ini dapat menghambat usaha perkoperasian karena karena saat ketidakhadiran staf ini akan menghambat jalannya administrasi perkoperasian khususnya pada proses di unit simpan pinjam koperasi. Seharusnya proses administasi ini tidak hanya bertumpu pada satu orang melainkan seluruh staf koperasi harus mampu melakukannya tidak hanya satu orang saja. Kontrol administrasi sangat penting bagi koperasi, memang perlu adanya satu orang yang bertanggung jawab mengenai administrasi tetapi bukan berarti hanya satu orang ini saja yang mampu handle masalah administrasi karena apabila satu orang ini hilang maka proses administasi koperasi akan terganggu. Oleh

karena itu, penulis akan membahas mengenai delapan tata kelola koperasi dan kemampuan karyawan KPN Mina Utama kementerian kelautan dan perikanan.

LANDASAN TEORI

1. Kepemilikan

Bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis.⁶

Karl Marx menyatakan bahwa sistem kepemilikan adalah suatu keniscayaan dalam sistem sosial masyarakat. Menurut Karl Marx, di bawah sistem kepemilikan buruh-proletariat mengalami nasib yang tragis yang tercermin dalam eksploitasi dan Alienasi. Oleh karena itu satu satunya cara untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan penghapusan kepemilikan, sebab bagi Karl Marx akar permasalahannya

terletak dalam sistem kepemilikan tersebut. Penghapusan tersebut, selanjutnya Karl Marx menawarkan konsep kepemilikan bersama. Dari pemikiran Karl Max dapat di anggap koperasi menjadi salah satu jalan keluar untuk masalah yang ada dengan kepemilikan koperasi yang bersifat bersama (setiap anggota merupakan pemilik koperasi) dan juga anggota koperasi yang berkumpul membentuk koperasi tersebut memiliki tujuan yang sama berdasarkan kebutuhan mereka (satu tujuan). Untuk menunjukkan indikator kepemilikan, terdapat beberapa variabel, yaitu keanggotaan koperasi, syarat anggota, hak anggota, kewajiban anggota, RAT, hak atas kekayaan intelektual, dan permodalan koperasi. Seorang anggota koperasi wajib mengetahui kewajiban dan haknya sebagai anggota Koperasi yang telah diatur dalam AD/ART Koperasi.

⁶Sitio, arifin dan Halomoan Tamba, Koperasi : Teori dan Praktik (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm.14

Kepemilikan koperasi ditandai dengan dibayarnya simpanan pokok pada saat masuk menjadi anggota yang dibayar hanya sekali selama menjadi anggota, selain itu ada pula simpanan wajib, yang harus dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Jenis dan besar simpanan-simpanan tersebut ditentukan dan ditetapkan oleh anggota dalam rapat anggota. Oleh karena itu mengapa koperasi disebut perusahaan anggota karena peranan anggota sangat diutamakan dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

Koperasi Mina Utama sebagai koperasi tentunya dimiliki bersama oleh anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi harus mampu memiliki rasa layaknya seorang pemilik perusahaan agar keberlangsungan koperasi bisa terjaga. Anggota KPN Mina Utama KKP adalah para pegawai negeri yang masih aktif didalam lingkup Kementerian Kelautan. Untuk menjadi anggota, ada beberapa syarat yang

harus dipenuhi anggota dan itu tertuang didalam AD/ART koperasi, yaitu :

1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa tidak dalam perwalian),
2. Bertempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya
3. Mata pencaharian: Pegawai Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang gajinya terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
5. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Peraturan-Peraturan Perkoperasian yang berlaku.

Sebagai pemilik koperasi, anggota juga memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan perkoperasian, baik itu kegiatan usaha, kegiatan pelatihan maupun kegiatan social.

Tujuannya adalah untuk memajukan dan ikut mensukseskan keberadaan KPN Mina Utama sebagai koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. KPN Mina Utama juga sangat peduli terhadap kualitas sumber daya manusianya, baik itu untuk para pengurus koperasi, maupun untuk para anggotanya. Itu terbukti dengan selalu dituangkannya rencana-rencana pelatihan yang diusulkan pada RAT tahun 2014.

2. Kekuasaan

Russel (1983) menyatakan bahwa power (kekuasaan) adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang. **Riker** (1964) berpendapat bahwa perbedaan dalam kekuasaan benar-benar didasarkan pada perbedaan kausalitas (sebab-akibat). Robert A. Dahl (1978 : 29) berpendapat bahwa “kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk memengaruhi dari seseorang kepada orang

lain, atau dari satu pihak kepada pihak lain”.

Dalam pengertian yang lebih sempit, kekuasaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya dan masyarakat pada umumnya.

Didalam sebuah koperasi, tentunya kekuasaan tertinggi dipegang oleh Rapat Anggota Tahunan. Begitu juga pada KPN Mina Utama. Rapat Anggota Tahunan diadakan setiap tahunnya, kisaran bulan Februari-Maret. Pada tahun 2014 ini, KPN Mina Utama telah sukses menggelar RAT yang ke 50 kalinya atau sama dengan 50 tahun KPN Mina Utama berdiri. Didalam RAT, semua partisipasi dan kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya di laporkan dan dievaluasi. Dalam evaluasi inilah, peran para anggota dibutuhkan untuk membantu koperasi

merencanakan hal-hal apa saja yang perlu ditingkat, dan hal apa saja yang harus diperbaiki, ditambah, maupun dikurangi. Hasil dari RAT ini nantinya telah disepakati secara bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

3. Insentif

Menurut Nitisemito (1996:165), insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Pangabean (2002:93), insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Jadi, yang dimaksud dengan insentif ialah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

Koperasi Mina Utama telah memberikan berbagai macam insentif kepada para anggota, maupun karyawan koperasi.

Tujuannya adalah sebagai bentuk penghargaan serta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Pembagian insentif yang paling dasar adalah dengan adanya pemberian SHU sesuai dengan jasa-jasa yang telah mereka lakukan. Selain itu, saat menjelang hari raya Idul Fitri, KPN Mina Utama juga tidak lupa memberikan bingkisan hari raya yang berisikan minyak goreng, sirup, biscuit dll. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peduli koperasi kepada para anggotanya dan karyawannya.

4. Kontrol Administrasi

Menurut Edy Sukarno, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal.

Wilson dan Compbell mengemukakan bahwa pengendalian administratif (*administrative control*) terdiri dari rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya hanya berhubungan secara tidak langsung dengan catatan finansial. Pada umumnya ia meliputi pengendalian-pengendalian seperti misalnya analisa statistik, time and motion studies, laporan pelaksanaan, program latihan pegawai dan pengendalian kualitas. Dapat pula dikatakan bahwa kontrol administratif ialah suatu pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap suatu sistem dan segala kegiatan yang telah direncanakan agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

Kontrol administrasi di KPN Mina Utama juga sudah dapat dikatakan dengan baik. Itu terbukti dari adanya kerja sama antara ketua, pengurus, manager dan

karyawan koperasi. Setiap harinya, kegiatan yang berlangsung di pertokoan baik itu di kantor yang berada di Gambir, di Menara 165 maupun di Kebagusan, terkoordinasi dengan baik. Untuk kantor yang berada di Gambir, langsung di pantau oleh manager koperasi itu sendiri, dan untuk yang di Menara 165 dan di Kebagusan terkoordinasi melauli via telpon ataupun fax-mail. Biasanya ketua unit pertokoan yang berada di menara 165 dan di Kebagusan melaporkan masalah-masalah ataupun kegiatan yang terjadi setiap harinya kepada manager koperasi yang berada di Kantor Gambir yang merupakan pusat koperasi. Tak jarang pula manager koperasi mengunjungi cabang-cabang koperasi tersebut. Ketua, pembina, pengawas dan pengurus koperasi kadang juga sering bertemu atau mengobrol via telepon untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi atau hanya sekedar membahas tentang pengembangan koperasi. Hal ini tentunya sangat baik untuk KPN Mina Utama sebagai

badan koperasi yang baik. Akan tetapi pada kenyataan dalam pelaksanaannya ternyata adanya pengendalian karyawan atau semua tugas mencakup administrasi koperasi bertumpu pada beberapa staf atau karyawan tertentu saja. Jadi, apabila karyawan ini tidak hadir atau sedang ada tugas keluar maka staf lain tidak dapat melakukan back-up atau handle tugas staf ini karena perbedaan kapasitas pada kemampuan staf atau kurangnya pengetahuan staf lain akan pekerjaan tersebut. Hal ini didasarkan kurangnya pelatihan staf terhadap pekerjaannya.

5. Kepengurusan

James A.F Stoner & Charles Wienkel menyatakan bahwa pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain dalam organisasi bagi mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Pengurus dalam koperasi adalah perangkat

organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dalam manajemen koperasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai mandat yang diberikan oleh rapat anggota

Susunan pengurus di KPN Mina Utama ditetapkan melalui RAT. Untuk kepengurusan KPN Mina Utama masa bhakti 2014-2016 ditetapkan dalam RAT ke 49 tahun buku 2013. Kepengurusan ini diganti dan dipilih kembali oleh anggota jika masa waktunya sudah selesai, atau akan diadakan Rapat Luar Biasa jika terjadi pengunduran atau meninggal dunia pada salah satu pengurus koperasi. Sesuai dengan kebijakan pengurus, kegiatan operasional usaha dilimpahkan kepada manajer yang dibantu beberapa karyawan yang tertuang dalam Keputusan Pengurus KPN Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 103/KMU/IX/2010 tentang Surat Perjanjian Kerja. Melihat penjelasan diatas, praktikan

menilai bahwa koperasi ini jelas strukturnya beserta kegiatan kerjanya.

6. Partner Usaha

Menurut Suparwoto, persekutuan (*partnership*) dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan (*Partnership*) adalah suatu penggabungan di antara dua orang (badan) atau lebih untuk memiliki atau bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba.

Pengembangan usaha koperasi juga dilakukan oleh KPN Mina Utama untuk meningkatkan kualitas, layanan dan keuntungan dalam mencapai kesejahteraan

para anggotanya. Salah satu caranya dengan mengadakan kerja sama usaha dengan perusahaan, koperasi ataupun lembaga-lembaga lainnya yang dapat menguntungkan koperasi. Kegiatan kerjasama KPN Mina Utama adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama usaha pengelolaan ruangan di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru
2. Kerjasama dengan PT. Arminareka dalam rangka pelaksanaan Haji dan Umroh
3. Kerjasama dengan PT. Aquatic Consultans dalam bidang usaha jasa konsultasi dibidang Kelautan dan Perikanan.
4. Kerjasama kredit Multi Guna dengan Bank ICB Bumiputera
5. Kerjasama Budidaya Keramba Jaring Apung di maleber
6. Kerjasama Usaha dengan PT. Inti Cakrawala Citra untuk usaha pertokoan koperasi

-
7. Kerjasama dengan PT. Bangun Kreasi Cemerlang untuk pengadaan barang-barang elektronik
 8. Kerjasama dengan PT. Astra International Tbk untuk pengadaan sepeda motor Honda.
 9. Kerjasama dengan PT. Putra Persada Nusantara untuk pengadaan sepeda motor Yamaha.

Banyaknya kerjasama yang dilakukan koperasi membuat KPN Mina Utama menjadi pilihan utama para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

7. Kontrak Hukum

Michael D Bayles mengartikan *contract of law* atau Kontrak hukum adalah *Might then betaken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement.* (Michael D. Bayles, 1987:143) Artinya, Kontrak Hukum adalah sebagai aturan

hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa, misalnya dalam melakukan suatu kerjasama antara koperasi dengan suatu perusahaan tentunya harus melakukan perjanjian atau persetujuan dengan kedua belah pihak, di mana kerjasama tersebut akan terjalin apabila kedua belah pihak menyetujui segala aturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam melakukan kerjasama tersebut.

Kontrak hukum antara KPN Mina Utama dengan partner usahanya berjalan dengan baik. Itu terlihat dari adanya upaya koperasi dengan meningkatkan dan terus melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan partner usahanya. Sebagai contoh, koperasi membantu meningkatkan penjualan barang elektronik dan kendaraan roda dua di usahanya agar dapat terus bekerja sama dengan para partner usaha yang mengadakan

barang-barang tersebut. Selain itu, koperasi juga terus meningkatkan penjualan dari pertokoannya agar kerjasama dengan PT. Inti Citra Cakrawala OMI Waralaba terus berjalan dengan baik.

8. Modal Sosial

Cohen dan Prusak (2001) mendefinisikan bahwa *social capital* merupakan suatu kesediaan melakukan hubungan aktif antara seseorang meliputi: kepercayaan, kerjasama yang saling menguntungkan, nilai dan perilaku yang mengikat setiap anggota jaringan dan kemasyarakatan juga kemungkinan membuat kerjasama.

Pemahaman tentang *social capital* ini diharapkan akan meningkatkan kinerja suatu organisasi dan pendapatan lebih baik. Di sisi bisnis melalui *social capital* akan membangun dan mendorong karyawan lebih menarik berbisnis, dan dapat mengeksplorasi kesempatan dan kemungkinan terbaik

didapatkan jaringan kerja melalui *social capital*. Modal social yang telah dilakukan KPN Mina Utama dengan para partner usahanya sudah dapat dikatakan dengan baik. Terbukti dengan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak agar usaha kerjasama mereka terus berlangsung dan saling menguntungkan.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan teori-teori yang telah dijelaskan bahwa koperasi sangat penting memperhatikan tata kelola yang dijalankan. Sebab keberadaan koperasi yang merupakan soko guru dari perekonomian Indonesia untuk saat ini belum banyak terlihat koperasi yang memiliki perkembangan dengan baik. Meskipun tidak dipungkiri ada beberapa koperasi yang bisa melaju ke arah internasional. Namun di samping itu juga tidak sedikit koperasi yang terlibat dalam kasus yang menyimpang. Tentu saja hal ini menjadi kontroversi dalam perkoperasian.

Bagaimana cara koperasi dapat berjalan dengan sehat dan wajar apalagi untuk tetap menarik perhatian masyarakat untuk bergabung sebagai anggota. Meyakinkan masyarakat bahwa koperasi masih memiliki peranan penting dalam perekonomian dan tetap mampu eksis dalam menjalankan segala bidang usahanya.

Koperasi pegawai negeri mina utama kementerian kelautan dan perikanan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam seperti koperasi pada umumnya, dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan. Pengelolaan tata kelola yang belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik dan benar. Misalnya saja dalam control administrasi yang masih sangat minim dalam hal SDM karyawan yang bekerja pada koperasi. Kurangnya staf koperasi pada bagian administrasi membuat adanya kendala dalam pelaksanaan sistem administrasi koperasi.

Terlihat dari staf administrasi terdapat beberapa staf administrasi pada koperasi ini tetapi yang terlihat paling menonjol hanya satu orang yaitu ibu robi beliau terlihat seperti memegang kendali penuh akan apapun di koperasi terutama yang berhubungan dengan berkas-berkas administrative khususnya dalam unit simpan pinjam koperasi. Baik dalam berkas permohonan pinjaman, pencairan pinjaman, syarat-syarat pinjaman, dan sebagainya. Hampir semua beliau yang menanganinya. Akan terjadi berbagai kendala apabila beliau tidak ada di tempat atau beliau harus izin tidak masuk bekerja, maka terjadi kesulitan pada hari beliau tidak hadir. Staf yang lain berusaha menggantikan tugas beliau namun ada kendala-kendala yang menghambat karena staf lain tidak begitu mengerti mengenai tugas administrative ini.

Kemungkinan hal ini terjadi karena kurangnya kontrol administrasi koperasi pada karyawannya, karyawan lain hanya

bertumpu pada beberapa orang saja atau dapat dikatakan hanya beberapa orang ini lah yang mampu menjalankan pekerjaan dengan semestinya sehingga beberapa pekerjaan tidak bisa dilakukan bila tidak hadirnya karyawan ini. Seharusnya adanya pembagian kerja yang jelas tidak seperti ini satu karyawan memegang banyak pekerjaan dan tanggung jawab, hal ini akan berpengaruh pada kinerja koperasi sendiri apabila satu orang ini tidak hadir. Juga akan berefek pada diri karyawan itu sendiri karena banyaknya tugas membuat pekerjaan yang dilakukan kurang sempurna atau terjadinya beberapa kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Sebaiknya koperasi memikirkan masalah ini untuk ditanggulangi dengan penambahan SDM karyawan koperasi, sehingga dalam satu bagian terdapat dua orang yang sama kemampuannya dan pengetahuannya dalam menjalankan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang ditimbulkan apabila

tidak hadirnya salah satu staf sehingga staf lain dapat handle pekerjaan staf yang tidak hadir tersebut. Dan tidak adanya saling bergantung antar staf dalam menjalankan tugas serta pembagian kerja pun seimbang karena setiap karyawan atau staf memiliki kapasitas yang sama dan bisa saling melengkapi satu sama lain.

Pengadaan pelatihan bagi staf karyawan koperasi pun perlu diadakan minimal satu tahun sekali sehingga kapasitas atau skill mereka dapat terupdate terus, apabila adanya karyawan baru pun dapat belajar dari pelatihan ini. Karyawan lama membagikan pengalamannya lewat pelatihan ini ataupun instruktur profesional yang di datangkan untuk mengajarkan kepada karyawan mengenai tugas-tugas mereka.

KESIMPULAN

Bahwa pada dasarnya koperasi harus memperhatikan detail-detail penunjang keberhasilan koperasi. Seperti tata kelola

yang baik agar dalam perkembangannya koperasi dapat bergerak secara dinamis menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan koperasi yakni mensejahterakan anggotanya. Serta memperhatikan kontrol administrasi koperasi dalam hal ini adalah bagian kapasitas karyawan atau kemampuan SDM koperasi agar tidak adanya ketergantungan pada salah satu orang tetapi masing-masing memiliki kemampuan yang sama sehingga pembagian kerja akan sangat mudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Hendar dan Kkusnadi, 1999, *Ekonomi Koperasi (untuk perguruan tinggi)*, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI

Kartasapoetra. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mutis, Thoby. 2004. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta : PT.Gramedia

Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ropke, 1997, *Ekonomi Koperasi (teori dan manajemen)*, terjemahan Sri Djatnika S. Arifin, Jakarta, Salemba Empat

Sitio, arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta :Erlangga

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Sudarsono dan Edilius. 2010. *Koperasi dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukamdiyo, Ignasius. 1997. *Manajemen Koperasi*. Semarang: Erlangga.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2008. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

